

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TENTANG PRAKTIK UTANG-PIUTANG GABAH
PADA LUMBUNG PADI
(Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo
Kabupaten Lampung Tengah)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana SI
Dalam Ilmu Syariah



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441H/2020M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TENTANG PRAKTIK UTANG-PIUTANG GABAH
PADA LUMBUNG PADI
(Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo
Kabupaten Lampung Tengah)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana SI
Dalam Ilmu Syariah



**SRI WAHYUNI
NPM : 1621030375
Jurusan : Muamalah**

Pembimbing 1 : Drs. Haryanto, H., M.H

Pembimbing II : Juhrotul Khulwah, M.S.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441H/2020M**

Abstrak

Praktik utang-piutang yang terjadi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah adalah utang-piutang gabah pada lumbung padi yang dilakukan pada saat kekurangan biaya ekonomi. Karena minimnya penghasilan dari usaha mengharuskan masyarakat di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah untuk meminjam di lumbung padi kemudian pada waktu pembayaran ada kelebihan dari pinjaman yang diberlakukan. Adapun permasalahan pada skripsi ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana praktik utang-piutang gabah pada lumbung padi di Desa Bangunrejo, Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang praktik utang-piutang gabah pada lumbung padi Desa Bangunrejo, Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana praktik utang-piutang gabah pada lumbung padi di Desa Bangunrejo, Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang praktik utang-piutang gabah pada lumbung padi di Desa Bangunrejo, Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini termasuk penelitian *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan pola pikir deduktif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Praktik utang-piutang yang terjadi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah terjadi ketika seorang debitur mengalami kekurangan modal dalam usaha pertaniannya. Debitur mendatangi pihak kreditur untuk melakukan peminjaman dengan syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak kreditur, salah satunya adanya tambahan pengembalian pinjaman yang diperjanjikan pada awal akad dan debitur pun menyetujui hal tersebut. 2) Praktik utang-piutang gabah pada lumbung padi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah secara hukum Islam tidak diperbolehkan karena termasuk riba yang diharamkan dalam Islam. Praktik utang-piutang ini termasuk dalam jenis riba *qard*. Meskipun secara rukun akad dalam utang-piutang telah terpenuhi baik subjek, objek dan *shighat* akadnya. Namun jika dilihat dari syarat akad dalam utang-piutang transaksi ini tidak terpenuhi dikarenakan adanya tambahan yang dibayarkan debitur pada saat jatuh tempo yang membuat akad tersebut menjadi cacat secara hukum Islam. Secara hukum positif transaksi ini telah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu baik dari kesepakatan para pihak dalam perjanjian, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, objek perjanjian dan adanya sebab-sebab yang dihalalkan dalam suatu perjanjian serta telah memenuhi ketentuan pelaksanaan dalam suatu perjanjian.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Wahyuni
NPM : 1621030375
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktik Utang-Piutang Gabah Pada Lumbung Padi (Studi Di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)” adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juni 2020

Penulis



Sri Wahyuni

NPM. 1621030375



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung. Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

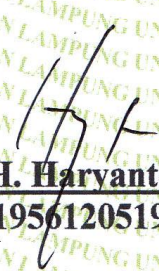
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang
Praktik Utang-Piutang Gabah pada Lumbung Padi (Studi di
Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten
Lampung Tengah)
Nama : Sri Wahyuni
NPM : 1621030375
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Haryanto, H., M.H.
NIP. 195612051983031002


Juhrotul Khulwah, M.S.I.
NIP. 199107092018012002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktik Utang-Piutang Gabah pada Lumbung Padi (Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)”** disusun oleh, **SRI WAHYUNI, NPM :1621030375**, program Studi **MUAMALAH**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal : Selasa/14 Juli 2020.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S. Ag., M.Si

Sekretaris : Hasanuddin Muhammad, M.H

Penguji I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M. Ag

Penguji II : Drs. H. Haryanto H., M.H

Penguji III : Juhrotul Khulwah, M.S.I

Mengetahui,
Dekan Fakultas UIN Raden Intan Lampung



Dr. H. Khairuddin, M.H.

NIP. 19750428 200710 1 003

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik
(menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan
pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.
Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan
kepadanyalah kamu dikembalikan.”*

(QS. Al-Baqarah [2]: 245)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 39.

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda kasih sayang, cinta dan hormat yang tak terhingga khususnya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Sarbini dan ibunda Hazimah yang tiada hentinya mendoakanku siang dan malam dengan tulus dan ikhlas, selalu memberikanku arahan dan nasehat dengan penuh kasih sayang, serta memberikanku dukungan yang sangat berharga bagiku baik dukungan moril maupun materil, terimakasih atas segala perjuangan yang kalian berikan sehingga mengantarkan penulis pada tahap ini;
2. Bibiku Hj. Meylena Tarsini, A.Md. Keb. dan Pamanku H. Nadi Zaenal, terimakasih atas segala do'a dan dukungan moril serta materil yang tak terhingga kepadaku.
3. Kakekku tersayang Kurnain (alm) dan Nenekku tercinta Sarmala, terimakasih atas kasih sayang, do'a serta motivasinya.
4. Kakakku Hasanah dan kakak iparku Yadi serta keponakanku Fatan Rizki Kandavi, terimakasih atas do'a dan semangatnya.
5. Para dosen pembimbing Bapak Drs. H. Haryanto, H., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir.
6. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tempatku menggali ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga bagi kehidupan penulis.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Sri Wahyuni dilahirkan pada tanggal 10 Juli 1996 di Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus. Anak ke-dua dari dua bersaudara, buah hati pernikahan dari pasangan Bapak Sarbini dan Ibu Hazimah.

Riwayat pendidikan pada:

1. SD Negeri 1 Teba Bunuk, pada tahun 2003 sampai tahun 2009
2. SMP Negeri 1 Kotaagung Barat, pada tahun 2009 sampai tahun 2012
3. SMA Muhammadiyah 1 Kotaagung, pada tahun 2013 sampai tahun 2016
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Fakultas Syariah dan Hukum dan mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) tahun 2016 dan selesai tahun 2020.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan karunia dan nikmat-Nya berupa nikmat kesehatan, pengetahuan dan petunjuk serta ridha-Nya, sehingga skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PRAKTIK UTANG-PIUTANG GABAH PADA LUMBUNG PADI (Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)” dapat penulis seslesaikan. Shalawat teriring salam tak lupa penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, berserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas bantuan dari berbagai pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terkhusus ungkapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Moh Mukri, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa memperhatikan serta memahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi mahasiswanya.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku ketua jurusan dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku Sekertaris Jurusan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

4. Bapak Drs. H. Haryanto, H., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku pembimbing II yang telah banyak menyempatkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, dan memberikan masukan serta solusi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Masyarakat di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah khususnya Kelompok tani “Putra Karya”, yang senantiasa membantu penulis dalam memberikan informasi dan data-data yang penulis butuhkan demi kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini
6. Para Dosen Fakultas Syariah dan staf civitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang begitu banyak membantu baik dalam memberikan informasi, sumber referensi buku-buku maupun data-data yang saya butuhkan dan lain sebagainya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku, Seriiyus : Shinta R.A, Eka Efrida, Ria Dirfa, Ira Astarina, Isma Wati, Yudistika Amara dan Kontrakan Kece : Siti Aminah, Marisa Putri, Sinta Mulyati, Dwi Nurrohmah Novia Ningrum, Beti Nova Sari, dan Asmi Jung, yang selalu memberikan dukungan serta semangat selama ini, terimakasih banyak.
9. Teman-teman seperjuanganku Muamalah angkatan 2016, khususnya kelas Muamalah G.

10. Rekan-rekan KKN Kelompok 218 di Simpang Kanan, Sumber Rejo, Tanggamus.

11. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT akan senantiasa memberikan balasan pahala yang tak terhingga kepada semuanya. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan, tidak hanya untuk penulis pribadi tetapi juga untuk para pembaca.

Aamin Ya Rabbal Aalamin.



Bandar Lampung, 2020

Penulis

Sri Wahyuni
NPM. 1621030375

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian atau Batasan Masalah	13
E. Rumusan Masalah	13
F. Tujuan Penelitian	13
G. Signifikasi atau Manfaat penelitian	14
H. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	14
2. Data dan Sumber Data	15
3. Metode Pengumpulan Data	16
4. Metode Pengolahan Data	17
5. Metode Analisis Data	18

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori	19
1. Akad	19
a. Pengertian Akad	19
b. Rukun Akad dan Syarat Akad	21
c. Macam-macam Akad	24
d. Berakhirnya Akad	26
2. <i>Qardh</i> Atau Utang-Piutang	27
a. Pengertian <i>Qardh</i> Utang-Piutang	27
b. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	30
c. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	34
d. Hikmah Disyariatkan <i>Qardh</i>	37

3. Riba	37
a. Pengertian Riba	37
b. Larangan Riba Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah	39
c. Jenis-Jenis Riba	42
d. Sebab-sebab haramnya riba	45
e. Dampak Negatif Riba	46
f. Hukum memberikan Kelebihan Dalam Membayar Utang	46
g. Perkara-perkara yang tidak boleh Terjadi Pelembihan dan Penundaan Padanya	47
h. Perkara-perkara yang Dilembihkan Pelembihan dan Dilarang Penundaan Padanya	48
4. Bunga	49
a. Pengertian Bunga	49
b. Macam-macam bunga	50
5. Perjanjian Dalam Hukum Positif	51
a. Pengertian Perjanjian	51
b. Syarat Sah Perjanjian	51
c. Jenis-Jenis Perjanjian	53
d. Pelaksanaan Perjanjian	54
B. Tinjauan Pustaka	55

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Bangunrejo, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah	58
1. Sejarah Berdirinya Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah	58
2. Letak Geografis Dan Keadaan Demografis Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah	61
3. Struktur Organisasi Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah	68
4. Sejarah Lumbung Padi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah	69
B. Praktik Utang-piutang Gabah Pada Lumbung Padi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah	72

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Utang-piutang Gabah Pada Lumbung Padi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah	85
B. Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktik Utang-	

piutang Gabah Pada Lumbung Padi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah	87
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Rekomendasi	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Riset dari Kesatuan Bangsa dan Politik Bandar Lampung
Lampiran 2 Pedoman Wawancara
Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 4 Blanko Konsultasi Skripsi



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
A. Data Nama Kepala Desa Sebelum dan Sesudah Berdirinya Desa Bangunrejo	60
B. Data Pembagian Wilayah Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah	62
C. Data Tingkat Pendidikan di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah	64
D. Data Mata Pencaharian Penduduk di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah	65
E. Data Kepemilikan Ternak di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah	66
F. Data Prasarana Kampung di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah	66

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
A. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Banghunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah	68



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Berita Acara Seminar Proposal dan Mun aqasyah
2. Surat Izin Penelitian/Survey Provinsi Lampung
3. Surat Izin Penelitian/Survey Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo
Kabupaten Lampung Tengah
4. Daftar Pertanyaan Wawancara Pihak Kreditur pada Lumbung Padi
5. Daftar Pertanyaan Wawancara Pihak Debitur pada Lumbung Padi
6. Surat Keterangan Wawancara
7. Kartu Konsultasi Bimbingan
8. Cover Skripsi ACC Cetak
9. Turnitin



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, maka diperlukan adanya penegasan tentang arti dan maksud dari istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Adanya penegasan judul ini diharapkan supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna judul dari beberapa istilah yang digunakan pada skripsi ini. Maka perlu dijelaskan tentang beberapa istilah yang terdapat didalam skripsi ini yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktik Utang-Piutang Gabah Pada Lumbung Padi** (Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah). Adapun istilah-istilah yang harus dijelaskan adalah sebagai berikut:

Tinjauan didalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb), perbuatan meninjau.¹

Hukum Islam adalah serangkaian aturan dalam ajaran Islam yang disusun secara terperinci berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul sehingga memiliki kekuatan bagi orang-orang yang meyakini adanya kebenaran wahyu

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

dan sunnah rasul tersebut, yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.²

Hukum Islam adalah hukum-hukum yang telah diatur secara jelas dan tegas dalam Al-Qur'an, sunnah, maupun ijma', atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung maupun tidak langsung oleh wahyu, seperti kewajiban zakat, puasa, haji, zakat mal, zakat penghasilan, dll.³

Tinjauan hukum Islam yaitu perbuatan mengkaji atau mempelajari atau menelaah suatu hal yang akan dilihat dari segi hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, hadis maupun ijma' para sahabat yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an dan kitab-kitab fikih.

Hukum Positif yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.⁴

Utang-piutang adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.⁵

Gabah berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia adalah butir-butir padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit.⁶

²Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Cet.Ke-1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

³Siti Mahmudah, "Reformasi Syariat Islam: Kritik Pemikiran Khalil Abdul Karim", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 13 No. 1 (Juli 2016), h. 83.

⁴C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 73.

⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 230.

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 428.

Utang-Piutang gabah yang dimaksud adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak, yang mana satu pihak menyerahkan gabah atau padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit kepada pihak lain yang ingin meminjamnya, dengan ketentuan pihak yang menerima padi tersebut harus mengembalikan padi kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.

Lumbung menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu rumah panggung yang ber dinding bambu sebagai tempat penyimpanan hasil pertanian.⁷

Padi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tumbuhan yang menghasilkan beras, termasuk jenis *oryza* (ada banyak macam dan namanya); butir dan buah padi.⁸

Jadi lumbung padi yang dimaksud disini adalah lumbung yang digunakan oleh masyarakat di Desa Bangunrejo sebagai tempat penyimpanan hasil pertanian seperti padi untuk dijadikan sebagai tempat usaha.

Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan diatas, dalam judul penelitian ini yaitu: **Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktik Utang-piutang Gabah Pada Lumbung Padi (Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah**, maka saya ingin mengetahui seperti apa praktik utang-piutang gabah pada lumbung padi yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Bangunrejo, dan saya ingin mengetahui praktik utang-piutang gabah pada lumbung padi ini dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

⁷ *Ibid.* h. 895.

⁸ *Ibid.* h. 996.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif, melihat masalah yang ada pada masyarakat di desa Bangurejo bahwa pada saat kekurangan dalam hal pangan, mereka melakukan akad utang-piutang gabah yang mana pada saat pengembalian utang tersebut terdapat tambahan yang diberlakukan, dalam hal ini terdapat ketidakjelasan hukum apakah tambahan yang diberlakukan termasuk yang diperbolehkan atau tidak (riba).
2. Alasan Subjektif
 - a. Tersedianya literatur yang mendukung serta menunjang, sangatlah memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
 - b. Judul yang penulis angkat relevan dengan disiplin ilmu yang sedang penulis tekuni saat ini yaitu di bidang (Muamalah) yaitu Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dan permasalahan ini belum ada yang membahas sehingga penulis dapat mengangkatnya menjadi sebuah judul skripsi.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari peran orang lain dalam kehidupan. Manusia dituntut untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, baik untuk kebutuhan diri pribadi, maupun sosial. Kegiatan ekonomi termasuk juga kedalam kegiatan bermuamalah yang sangat dianjurkan dalam Islam bahkan tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Karena ajaran tentang muamalah

berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang dikandung oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁹

Fiqh Muamalah adalah hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (*amaliah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.¹⁰

Ruang lingkup *fiqh muamalah* terbagi menjadi dua yaitu yang pertama bersifat *adabiyah* seperti *ijab qabul*, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, dan lain sebagainya. Yang kedua bersifat *madiyah* yaitu mencakup segala aspek kegiatan ekonomi manusia seperti harta, *buyu'* (jual beli), *ar-rahn* (gadai), *Qardh* (utang-piutang), *wakalah* (perwakilan), *syirkah* (perkongsian), dan lain sebagainya.¹¹

Dalam Islam kita sangat dianjurkan untuk saling berinteraksi antar masyarakat satu dengan yang lainnya, khususnya dalam hal ini pada bidang muamalah. Dalam bermuamalah sebaiknya kita sebagai makhluk sosial haruslah saling tolong menolong serta bahu membahu dalam hal kebaikan agar terciptanya kerukunan dan kekeluargaan dalam hidup bermasyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 9.

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 2.

¹¹ *Ibid.* h. 3.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah (5):2).¹²

Dalam muamalah ada berbagai macam bentuk transaksi diantaranya adalah *qardh* atau utang-piutang. *Qardh* berasal dari bahasa Arab yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.¹³ *Qard* di kalangan ahli bahasa didefinisikan “lafaz *al-Qardu* berarti *al-Qat’u* (memotong).¹⁴ *Qardh* atau utang-piutang adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.¹⁵

Hukum *qardh* berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Adakalanya hukum *qardh* boleh, kadang wajib, makruh, dan haram. Pada dasarnya *Al-qardh* disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan, akad utang-piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Memupuk kasih sayang

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 106.

¹³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 229.

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Mualamah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 167.

¹⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 230.

terhadap sesama manusia dengan menguraikan kesulitan yang dihadapi orang lain.¹⁶

Seperti halnya di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, masyarakatnya memiliki rasa simpati dan kepedulian yang besar terhadap lingkungan maupun kepada sesamanya. Mereka tidak tinggal diam ketika melihat orang-orang di sekeliling mereka sedang mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan. Mayoritas masyarakat di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah berprofesi sebagai petani. Karena hal tersebut tidak jarang dari mereka melakukan suatu usaha dalam bidang pertanian. Salah satunya mereka bekerja sama untuk membuat suatu wadah yang bertujuan untuk membantu petani yang sedang mengalami kesulitan dalam hal pangan dan juga untuk dapat memberikan kontribusi sosial di lingkungan tempat tinggal mereka.

Sebuah kelompok tani yang beranggotakan 10 orang membuat sebuah wadah yang disebut lumbung padi, lumbung padi ini digunakan sebagai tempat penyimpanan padi dari kelompok tani tersebut. Pada praktikinya anggota kelompok tani iuran padi atau gabah dengan jumlah yang sama, kemudian padi tersebut dimasukkan pada lumbung padi yang telah mereka buat. Kemudian Jika pada suatu waktu ada pihak atau petani yang sedang mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan, maka mereka dapat meminjam padi yang ada pada lumbung padi milik anggota kelompok tani baik untuk dikonsumsi, dijual ataupun untuk digunakan sebagai bibit dan sebagainya.

¹⁶.*Ibid.* h. 232.

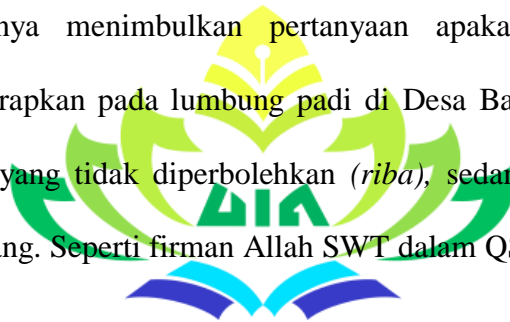
Petani yang ingin meminjam gabah di lumbung padi tersebut, baik dari pihak anggota maupun dari masyarakat di desa tersebut maka si peminjam harus melebihkan jumlah pinjaman padinya tersebut yaitu sebesar 1,25%/kg dari modal gabah yang dipinjam. Tambahan atau kelebihan 1,25%/kg tersebut harus dibayarkan oleh peminjam setelah panen, meskipun si peminjam mengalami gagal panen. Jika gabah yang dipinjam tidak dibayarkan setelah panen, maka tambahan atau kelebihan 1,25%/kg tersebut akan terus bertambah selama petani tersebut masih meminjam padi yang ada di lumbung padi.

Perihal masalah ini dapat digambarkan sebagai berikut: Pak Yadi adalah seorang petani di Desa Bangunrejo, ia membutuhkan 1 kwintal gabah untuk dikonsumsi dan untuk dijadikan benih padi pada saat musim tanam tiba, kemudian pak Yadi berinisiatif untuk meminjam gabah kepada kelompok tani yang memiliki usaha lumbung padi di desanya. Kelompok tani menawarkan kepada pak Yadi bahwa jika pak Yadi ingin meminjam gabah 1 kwintal atau 100 kg, maka pak Yadi harus mengembalikan gabah tersebut dengan tambahan 1,25%/kg dari gabah yang dipinjamnya. Jika dijumlahkan yaitu modal dikalikan kelebihannya yaitu $= 100 \text{ kg} \times 1,25\% = 125 \text{ kg}$ (modal dan kelebihannya), sehingga bunga yang diperoleh dari 100 kg tersebut adalah sebesar 25 kg gabah.

Kelebihan 25 kg gabah ini harus dibayarkan pak Yadi setiap selesai panen, walaupun pak Yadi tidak bisa membayar modal pinjaman gabahnya yaitu 1 kwintal atau 100 kg karena gagal panen, tetapi pak Yadi harus tetap membayar kelebihan yaitu 25 kg dari gabah yang dipinjamnya. Jika pak Yadi juga tidak

mampu membayar kelebihan 25 kg nya, maka pak Yadi dianggap masih memiliki utang, dan di panen selanjutnya pak Yadi harus membayar kelebihannya yaitu 25 kg utang gabah sebelumnya ditambah kelebihan 1,25%/kg dari hasil pinjaman pada saat panen itu, ditambah modal yang dipinjam yaitu 1 kwintal atau 100 kg jika pak Yadi ingin keluar atau tidak ingin meminjam gabah lagi di lumbung padi tersebut. Pak Yadi pun menyetujui penawaran dari kelompok tani untuk meminjam gabah di lumbung padi milik kelompok tani.

Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan apakah kelebihan atau tambahan yang diterapkan pada lumbung padi di Desa Bangunrejo termasuk kedalam tambahan yang tidak diperbolehkan (*riba*), sedangkan dalam Islam *riba* sangatlah dilarang. Seperti firman Allah SWT dalam QS. Baqarah (2):275, yang berbunyi:



... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.(QS. Al-Baqarah (2):275).¹⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa yang merupakan penuntasan ayat ini dapat ditafsirkan sebagai bantahan atas pandangan mereka yang menolak ketetapan Allah, padahal mereka sudah mengetahui pemilahan Allah atas hukum yang satu dengan lainnya. Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya, tidak dimintai tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan-Nya, sedang mereka dimintai

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 47.

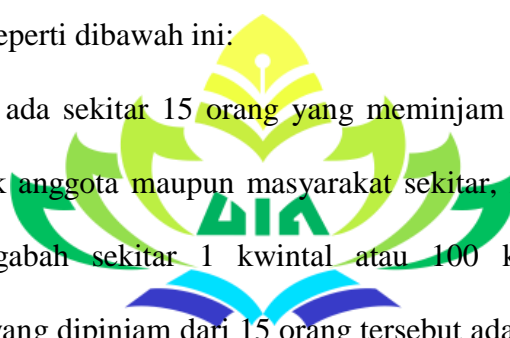
tanggung jawab. Dia mengetahui hakikat setiap persoalan dan kemaslahatannya serta apa yang berguna bagi hamba-hamba-Nya, lalu Dia membolehkannya bagi mereka. Sedangkan sesuatu yang dapat membahayakan mereka, maka Dia melarangnya.¹⁸

Di desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, menerapkan kelebihan atau tambahan 1,25%/kg dari hasil petani yang meminjam di lumbung padi 50% nya akan diberikan untuk keperluan sosial di masyarakat seperti pembangunan maupun renovasi masjid dan kepentingan sosial lainnya. Jika keperluan sosial tersebut sedang membutuhkan dana lebih besar lagi maka tidak hanya 50% atau $\frac{1}{2}$ dari hasil pinjaman yang diberikan tetapi bisa jadi lebih dari 50% bahkan ditambah juga dari modal lumbung padi, karena tujuan utama dibentuknya lumbung padi tersebut adalah agar bisa membantu masyarakat untuk membangun sarana dan fasilitas umum untuk kepentingan bersama di masyarakat sekitar. Kemudian 50% dari hasil pinjaman akan di tambahkan kedalam lumbung padi, sehingga padi yang ada akan terus bertambah setiap ada yang meminjam. Jadi keuntungan yang didapat dari hasil pinjaman pada lumbung padi bukan untuk dinikmati secara pribadi melainkan lebih kepada kepentingan dan kemaslahatan sosial sebagai wujud kontribusi kelompok tani kepada masyarakat di desa Bangunrejo kecamatan Bangunrejo kabupaten Lampung Tengah tersebut. Dengan adanya praktik utang-piutang ini tentunya memberikan kemudahan bagi para petani ketika membutuhkan pinjaman gabah dan masyarakat merasa terbantu dengan adanya dana yang

¹⁸ Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 452-453.

diberikan oleh kelompok tani dari hasil pinjaman gabah untuk pembangunan ataupun renovasi masjid sebagai fasilitas umum yang digunakan masyarakat di Desa Bangunrejo kecamatan Bangunrejo kabupaten Lampung Tengah.

Setiap setahun sekali kelompok tani melakukan pembongkaran lumbung padi untuk mengetahui berapa hasil dari peminjaman gabah di lumbung padi tersebut. Hal ini untuk memudahkan pembagian hasil peminjaman yang nantinya hasil tersebut akan dibagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ untuk digunakan sebagai dana sosial dan $\frac{1}{2}$ untuk ditambahkan kembali di lumbung. Untuk lebih memperjelas akan digambarkan seperti dibawah ini:



Dalam setahun ada sekitar 15 orang yang meminjam gabah di lumbung padi baik dari pihak anggota maupun masyarakat sekitar, masing-masing per orang meminjam gabah sekitar 1 kwintal atau 100 kg, berarti jumlah keseluruhan gabah yang dipinjam dari 15 orang tersebut adalah $15 \text{ orang} \times 100 \text{ kg} = 1.500 \text{ kg}$ atau 1 ton 5 kwintal gabah (modal gabah yang dipinjam). Tambahan yang dikenakan per kilogramnya yaitu 1,25%, sehingga perhitungannya adalah jumlah modal pinjaman dikalikan jumlah tambahan yaitu $1.500 \text{ kg} \times 1,25\% = 1.875 \text{ kg}$ (modal pinjaman dan kelebihan). Jadi kelebihan atau tambahan yang dikenakan untuk 1.500 kg gabah adalah: 1.875 kg (modal ditambah kelebihan) – 1.500 kg (modal pinjaman) = 375 kg (kelebihan).

Setiap kelebihan yang didapat dari hasil pinjaman gabah tersebut akan dibagi dua yaitu untuk dana sosial dan untuk ditambahkan di lumbung padi. sehingga $375 \text{ kg} : 2 \text{ pihak} = 187,5 \text{ kg}$. Jadi masing-masing pihak mendapatkan

187,5 kg gabah dari hasil pinjaman pada lumbung padi selama setahun dengan sekali pembongkaran lumbung padi.

Transaksi akad yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu anggota kelompok tani dengan petani atau peminjam hanya dilaksanakan secara lisan, tidak ada perjanjian secara tertulis antara kedua pihak sehingga perjanjian tersebut tidak mengikat dan bisa saja dilanggar oleh salah satu pihak tanpa adanya sanksi yang berlaku. Besarnya tambahan dari pinjaman gabah terkadang memberatkan para petani untuk membayarnya, sehingga ada kemungkinan terjadi kecurangan dari pihak peminjam yang mana dia tidak mampu membayar kelebihan gabah yang dipinjamnya sehingga setiap panen dia tidak membayarkan kelebihannya. Jika terjadi hal yang demikian, dari pihak kelompok tani memberikan peringatan serta teguran kepada pihak peminjam untuk dapat membayar kelebihan tersebut. Namun dikarenakan tidak adanya perjanjian yang secara jelas dan tertulis, maka kelompok tani tidak dapat berbuat banyak, dan mereka terpaksa hanya bisa mengikhlaskan utang kelebihan dari petani yang meminjam tersebut, disinilah pentingnya perjanjian secara tertulis.

Praktik utang-piutang yang diterapkan pada kelompok lumbung padi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah dengan Kelebihan atau tambahan sebesar 1,25%/kg yang diberlakukan pada setiap orang yang meminjam di lumbung padi belum diketahui secara jelas apa hukumnya apakah tambahan tersebut termasuk tambahan yang diperbolehkan

atau tidak. Dan apakah transaksi akad utang-piutang tersebut sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif atau tidak.

Berdasarkan uraian diatas menarik untuk diteliti tentang praktik utang-piutang gabah pada lumbung padi dan bagaimana hukum Islam dan Hukum Positif melihat tentang pelaksanaan praktik utang-piutang tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Praktik Utang-piutang gabah pada Lumbung Padi (Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)”.

D. Fokus Penelitian atau Batasan Masalah

1. Fokus Penelitian (kualitatif dan *action research*) yaitu pada kelompok tani lumbung padi di desa Bangunrejo kecamatan Bangunrejo kabupaten Lampung Tengah.
2. Batasan masalah pada penelitian ini adalah pada penerapan praktik utang-piutang gabah pada lumbung padi dan hukum pelaksanaan praktik utang-piutang gabah pada lumbung padi yang ada di desa Bangunrejo kecamatan Bangunrejo kabupaten Lampung Tengah tersebut.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik utang-piutang gabah pada lumbung padi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Hukum Positif tentang Praktik utang-piutang gabah pada lumbung padi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui praktik utang-piutang gabah pada lumbung padi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan Hukum Positif tentang praktik utang-piutang gabah pada lumbung padi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

G. Signifikasi atau Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi para pembaca untuk menambah pengetahuan yang berkaitan dengan hukum Islam lebih khusus pada bidang muamalah.
- b. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan kajian hukum tentang kegiatan *qardh* atau utang-piutang.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

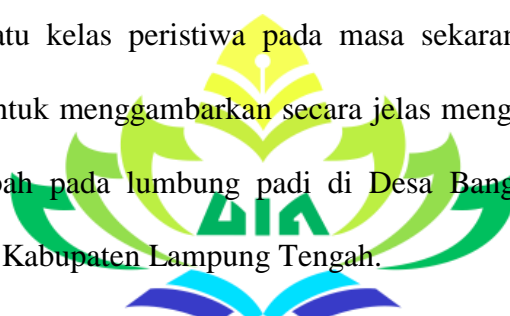
a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan

sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan.¹⁹ Dalam hal ini peneliti secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan penelitian guna memperoleh data-data serta informasi yang benar di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas mengenai praktik utang-piutang gabah pada lumbung padi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.



2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Sumber data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pihak yang memberi pinjaman (sekertaris lumbung padi), penerima pinjaman (anggota, masyarakat). Yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah seorang sekertaris lumbung padi, dan tiga orang yang melakukan utang-piutang gabah pada

¹⁹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Cet.Ke-14, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 46.

²⁰ Klean, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

lumbung padi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang melengkapi data primer, yaitu data-data yang bersumber dari dokumen dan sumber-sumber bacaan dari buku-buku, jurnal, dan skripsi-skripsi yang relevan dengan permasalahan ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial-keagamaan (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda, dan simbol-simbol tertentu) selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi, dengan mencatat dan merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.²¹

Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati bagaimana praktik sistem bagi hasil pada lumbung padi di desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

²¹ Imam Suprayogi, Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), h. 167.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat dan direkam.²²

Metode wawancara ini digunakan sebagai sumber untuk mendapatkan informasi dan data-data terkait dengan praktik utang-piutang gabah pada lumbung padi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.²³

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis, pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang telah terkumpul, meliputi kegiatan-kegiatan *editing*, dan *systematizing*

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah

²² Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 85.

²³ *Ibid.* h. 87.

untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi.²⁴

b. Sistematika Data (*systematizing*)

Sistematika data ini bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah di *edit* dan kemudian diberi tanda menurut urutan masalah dan kategori-kategorinya.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif yaitu menguraikan dan menilai data hasil penelitian yang berkaitan dengan bagaimana praktik sistem bagi hasil pada lumbung padi tersebut, kemudian ditinjau berdasarkan hukum Islam.

Pola pikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu pendekatan berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum yang tertitik tolak dari pengetahuan umum untuk menilai kejadian yang khusus.²⁵ Hasil analisisnya akan dimasukkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan pada penelitian ini.

²⁴ *Ibid.* h. 89.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 2*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h. 136.

BAB II KAJIAN TEORI

A. KAJIAN TEORI

1. AKAD

a. Pengertian Akad

Ketika seseorang melakukan suatu kegiatan ekonomi atau muamalah satu hal yang sangat penting yang harus diperhatikan adalah masalah akad (perjanjian). Akad merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melakukan suatu perjanjian dalam kegiatan muamalah agar perjanjian yang dilakukan dipandang sah dalam ajaran hukum Islam.

Suatu transaksi dianggap tidak sah apabila akad pada transaksi tersebut tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh hukum Islam seperti: rukun (pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan akad, ijab dan kabul) dan syaratnya tidak terpenuhi salah satunya yaitu akad itu diizinkan oleh *syara'*. Sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Lafad akad berasal dari lafad arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*).¹ Dari segi etimologi, akad bisa juga berarti *العقدة* (sambungan), *العهد* dan (janji).²

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 97.

² Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 43.

Terpenuhinya suatu akad dalam kegiatan muamalah dapat memastikan bahwa suatu transaksi itu sah secara hukum Islam, hal itu yang mengharuskan seseorang untuk memenuhi akad ketika melakukan perjanjian dalam kegiatan ekonomi.

Sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi:

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”(Q.S. Al-Maidah: 1).³

Surah An-Nisa’ mencakup sekian banyak ayat yang mengandung uraian tentang akad, baik secara tegas maupun tersirat. Yang tegas antara lain ada akad nikah dan *shidat* (*mahar*), serta akad perjanjian keamanan dan kerja sama. Yang tersirat antara lain akad wasiat, *wadi’ah* (titipan), *wakalah* (perwakilan) dan lain-lain. Maka sangat wajar jika awal ayat pada surat Al-Ma’idah ini memulai pesannya pada kaum beriman agar memenuhi semua akad perjanjian yang tersurat dan tersirat yang dikandung oleh surah yang lalu.⁴

Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan:

ارتباط إيجابٍ بقبولٍ على وجهٍ مشروعٍ يثبت أثره في محله

“Pertalian ijab (*pernyataan melakukan ikatan*) dan qabul (*pernyataan penerimaan ikatan*) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.”

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 106.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 5.

Pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*.⁵

Dengan adanya suatu akad para pihak terikat oleh ketentuan hukum Islam yang berupa hak-hak dan pemenuhan kewajiban-kewajiban (*iltizam*) yang harus diwujudkan.⁶

Menurut para ulama *fiqh* kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad diatas mengidentifikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus.⁷

b. Rukun Akad dan Syarat Akad

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun akad dan syarat akad.⁸

1) Rukun Akad

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi rukun akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah:

⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 97.

⁶ Usanti, Trisadini P, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 45.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 3.

⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 95.

- a) *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
- b) *Shighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul.⁹
- c) *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibah* (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.
- d) *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.¹⁰

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa rukun akad itu hanya ada satu, yaitu *shighat al-'aqd* (ijab dan kabul), sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad, menurut mereka, tidak termasuk rukun akad, tetapi termasuk syara-syarat akad, karena menurut mereka yang dikatakan rukun itu adalah suatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad berada diluar esensi akad.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad adalah subjek (*al-aqidain*), objek (*mahallul 'aqd*), dan ijab kabul (*sighat 'aqd*). Selain ketiga rukun tersebut Musthafa az Zahra menambah *maudhu'ul 'aqd*

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 72.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 47.

(tujuan akad), ia tidak menyebutkan keempat hal tersebut dengan rukun, tetapi dengan *muqawimat aqd* (unsur-unsur penegak akad).¹¹

2) Syarat Akad

Syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

- a) Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in 'iqad*),
- b) Syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihhah*),
- c) Syarat berlakunya akibat hukum akad (*syuruthan-nafadz*),
- d) Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*).¹²

Adapun syarat-syarat akad itu adalah:

- (1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (*ahli*). Tidak satu orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang dibawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
- (2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- (3) Akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- (4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli *mulasamah*.
- (5) Akad dapat memberikan faidah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan amanah.

¹¹ Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 46.

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 96.

- (6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya.
- (7) Ijab dan kabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.¹³

c. Macam-macam Akad

Akad memiliki berbagai macam nama dan hukumnya, dikarenakan objeknya yang berlainan. Dalam hukum Islam sendiri telah membedakan nama-nama itu antara satu dengan yang lainnya. Berikut dijelaskan tentang macam-macam akad tersebut antara lain:

- 1) Akad *sahih*, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *sahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad yang *sahih* ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:
 - a) Akad yang *nafis* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 - b) Akad *mauquf*, yaitu akad dilakukan seseorang yang cukup bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 50.

melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*.

- 2) Akad yang tidak *sahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syarat, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak *sahih* itu kepada dua macam, yaitu akad yang batil dan akad yang *fasad*. Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Sedangkan akad *fasid*, menurut mereka adalah suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas.¹⁴ Akad ini dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a) *Aqad Munjis*, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b) *'Aqad Mu'alaq*, ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syara-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.

¹⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 106-108.

c) *'Aqad Mudhaf*, ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.¹⁵

Dilihat dari segi penamaannya, para ulama *fiqh* membagi akad kepada dua macam, yaitu:

- 1) *Al-'uqud al-musammah*, yaitu akad-akad yang ditentukan namanya oleh syara serta dijelaskan hukum-hukumnya, seperti jual beli, sewa-menyewa, perserikatan, *hibah*, *al-wakalah*, wakaf, *al-hiwalah*, *al-ji'alah*, wasiat dan perkawinan.
- 2) *Al-'uqud ghair al-musammah*, yaitu akad-akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang masa dan tempat, seperti *al-istishna'*, *bai' al-wafa'*, dan lain-lain.

d. Berakhirnya Akad

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:¹⁶

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 50-51.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 108.

- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika: jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan, salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, berlakunya *khiyar syarat*, *khiyar aib*, atau *khiyar rukyah*, akad itu tidak dilaksanakan oleh salah-satu pihak, dan tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini, para ulama *fiqh* menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa-menyewa, *ar-rahn*, *al-kafalah*, *ays-syirkah*, *al-wakalah* dan *al-muzara'ah*.¹⁷

2. QARDH ATAU UTANG-PIUTANG

a. Pengertian *Qardh* Utang-Piutang

Qardh berasal dari bahasa Arab قرض yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 229.

Qardh di kalangan ahli bahasa didefinisikan sebagai berikut:

“Lafaz *al-Qardu* berarti *al-Qat’u* (memotong), قرضه-يقرضه dengan harakat kasroh pada huruf *ra* ’ ررضه قرضاً berarti memotongnya.”¹⁹

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk *masdar* dari *qaradha asy-syai’-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk *masdar* yang berarti memutuskan. Dikatakan *qaradha asy-syai’a bil-miqradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.²⁰

Wahbah az-Zuhaili mendefinisikannya secara bahasa sebagai potongan, maksudnya adalah harta yang dipinjam kepada seseorang yang membutuhkan. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta orang yang memberi pinjaman tersebut.²¹

Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.²²

Ada beberapa pendapat mengenai akad diantaranya sebagai berikut:

1) Al-Bahuti mendefinisikan *qardh* secara terminologi sebagai berikut:

دَفْعُ مَالٍ إِزْفَاقًا لِمَنْ يُنْتَفَعُ بِهِ وَيُرَدُّ بَدْلُهُ

¹⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 167.

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 331.

²¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 169.

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 332.

“Pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang yang akan menggunakannya, namun ada kewajiban untuk mengembalikannya”.²³

2) Golongan Hanafiyah berpendapat *qardh*, yaitu:

“Akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama”.

3) Golongan Syafi’iyah menjelaskan *qardh* adalah:

“Pemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama”.

4) Hanabilah mengemukakan *qardh* adalah:

“Menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya”.

5) Sayyid Sabiq menjelaskan *qardh* yaitu:

“Harta yang diberikan kepada orang yang berutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berutang mampu membayar”.

Jelasnya, *qardh* atau utang-piutang adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya dengan pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.²⁴

²³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 168.

²⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 229-230.

Menurut Rachmat Syafe'i, *qardh* adalah akad tertentu dengan membayarkan harta *mitsli* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.²⁵

Menurut Wahbah az-Zuhaili, *qardh* berarti pemilikan sesuatu pada yang lain, yang dalam penggantianannya tidak ada tambahan.²⁶

Ulama secara umum mendefinisikan *qardh* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang (debitur) kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.²⁷

b. Dasar Hukum *Qardh*

Landasan hukum disyariatkannya *qardh* berdasarkan Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Ijma'.²⁸

1) Al-Qur'an

Landasan berdasarkan Al-Qur'an yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang

²⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 231.

²⁶ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 44.

²⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 168.

²⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 332.

*banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 245).*²⁹

Allah mengumpamakan pemberian seseorang dengan tulus untuk kemaslahatan hamba-Nya sebagai pinjaman kepada Allah, sehingga ada jaminan dari-Nya bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan. Karena Allah yang meminjam maka Dia menjanjikan bahwa Dia akan menggandakan pinjaman itu kepadanya di dunia dan atau di akhirat, dengan lipat ganda yang banyak seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, dan pada setiap butir seratus biji bahkan lebih banyak. Karena itu, jangan khawatir memberikan pinjaman dan berjuang dengan harta benda di jalan Allah, apalagi pada akhirnya semua akan kembali kepada-Nya.³⁰

Dalam ayat lain Allah berfirman yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 12 yang berbunyi:

لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ
وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

“Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-rasulku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 39.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 246.

*Kumasukkan ke dalam syurga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai.” (QS. Al-Maidah [5]: ayat 12).*³¹

Allah SWT akan memberikan balasan pahala bagi orang yang mau memberikan pinjaman yang baik, seperti dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. Al-Hadid [57]: 11).*³²

Ayat tersebut menjelaskan tentang seruan untuk “meminjamkan kepada Allah SWT”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Hal ini juga selaras dengan seruan kita untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.³³

2) Dalam Hadis

Beberapa hadis yang berkaitan tentang *qardh* diantaranya sebagai berikut:³⁴

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 109.

³² *Ibid*, h. 538.

³³ Darsono, et. al, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 231.

³⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 170.

“Dari Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. bersabda: tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali”. (H.R. Ibn Majah dan Ibn Hibban).³⁵

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ مِمَّنْ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا تَقَا ضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِي صَا حِبِ الْحَقِّ مَقًا لَا وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ وَقَالُوا لَا بَحْدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سَنَةِ قَالَ اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ فَضَاءً

“Diriwayatkan dari Abu Huarairah r.a: Rasulullah SAW. pernah mempunyai utang kepada seorang laki-laki, lalu laki-laki itu menagih beliau dengan nada keras sehingga mengakibatkan rasa kesal sahabat-sahabat Nabi SAW. kepadanya. Akan tetapi Nabi SAW. bersabda: Sesungguhnya orang yang mempunyai hak dia berhak menuntut haknya. Lalu beliau bersabda kepada mereka (para sahabat beliau), belikanlah untuknya seekor unta muda, kemudian berikanlah unta itu kepadanya. Mereka berkata, kami tidak mendapat seekor unta yang lebih dari padanya. Beliau bersabda, belikanlah unta yang lebih baik untuknya dan berikanlah kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah orang-orang yang membayar utang. (HR. Abu Hurairah).³⁶

3) . Ijma’

Kaum muslimin juga telah bersepakat, bahwa *qardh* diisyaratkan dalam bermuamalah. Hal ini karena di dalam *qardh* terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap

³⁵ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, No. 2421, terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 414.

³⁶ Al-Hafizh Zaki Al-Din Abd Al-Adzim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, terjemahan Syindqithy Djamaluddin, Mochtar Zoerni, (Bandung: Mizan, 2002), h. 957-518.

qardh dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, disebutkan dalam KHES pasal 612-617.³⁷

c. Rukun dan Syarat *Qardh*

1) Rukun *Qardh*

Rukun *qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Sementara menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu:

1) ‘*aqidain* yang terdiri dari *muqridh* (yang memberikan utang), dan *muqtaridh* (orang yang berutang), 2) *Qardh* (barang yang diutangkan), 3) *Shighat*.³⁸

a) ‘*Aqidain*

yang dimaksud dengan ‘*aqidain* adalah pemberi utang dan pengutang.

b) *Qardh* atau harta yang diutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah: 1) harta berupa harta yang ada padanya, 2) harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa), 3) harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya

c) *Shighat*

Shighat adalah ijab dan kabul. Kata ijab Seperti, “aku memberimu utang,” aku mengutangimu”. Demikian pula kabul

³⁷ *Ibid.* h. 171-172.

³⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 232.

sah dengan semua lafaz yang menunjukkan keralaan, seperti “aku berutang,” atau “aku menerima,” atau “aku ridha” dan lain sebagainya.³⁹

2) Syarat *qardh*

Adapun syarat *qardh* diantaranya sebagai berikut:

- a) Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqaridh*), disyaratkan:

(1) *Baliqh*, berakal cerdas dan merdeka, Artinya cakap bertindak hukum.

(2) *Muqaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabaru'*. Artinya harta yang diutangkan merupakan miliknya sendiri.

- b) Harta yang diutangkan (*qardh*)

(1) Harta yang diutangkan merupakan *mal misliyat* yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang dapat diukur (*zari'yat*), harta yang dapat dihitung (*addiyat*). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.⁴⁰

(2) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli *salam*, baik itu jenis harta *makilat*, *mauzunat*, dan *addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah.

³⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 333.

⁴⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 172.

- (3) *Al-Qabad* atau penyerahan. Akad utang-piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam akad *qardh* ada *tabarru'*. Akad *tabarru'* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (*al-qabadh*).
- (4) Utang-piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqaridh* (orang yang mengutangkan).
- (5) Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtarid* (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- (6) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*mal mutaqawwim*).
- (7) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
- (8) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.

c) *Shighat* ijab dan Kabul

Akad *qardh* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan Kabul berupa lafal *qardh* atau yang sama pengertiannya, seperti “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan,

seperti “aku berutang”, atau “aku menerima”, atau “aku ridha” dan lain sebagainya.⁴¹

Az-Zuhaili juga menjelaskan dua syarat lain dalam akad *qardh*, pertama, *qardh* tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkan. Kedua, akad *qardh* tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya.⁴²

d. Hikmah Disyariatkan *Qardh*

Hikmah disyariatkannya *qardh* yaitu sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- 2) Memperkuat ikatan *ukhuwah* (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.
- 3) Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan akan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.⁴³

3. RIBA

a. Pengertian Riba

Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:

⁴¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 234.

⁴² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 172.

⁴³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 233.

- 1) Bertambah (الرِّبَادَةُ) karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan.
- 2) Berkembang, berbunga (النَّامُ) karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- 3) Berlebih atau menggelembung, kata-kata ini berasal dari firman Allah:

إِهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ

“Bumi jadi subur dan gembur.(Q.S.Al-Hajj: 5)

Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian.⁴⁴

Kata “Riba”, ialah “Ar Riba” (الرِّبَا) yang tersebut dalam Al-Qur’an:

“Rabb” (رَبٌّ) yang mengandung arti: bertambah, berkembang, naik dan meninggi. Dikatakan: “Rabal Maalu” (رَبَا الْمَالُ), artinya bertambah harta itu – bila bertambah dan berkembang.⁴⁵

Pengertian riba menurut istilah adalah:

فَضْلُ مَالٍ بِلاَ عَوَضٍ فِي مُعَاوَضَةِ مَالٍ بِمَالٍ

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 57.

⁴⁵ Abdullah Suhaili, *Riba*, (Jakarta: Hudaya, 1970), h. 89.

“Kelebihan harta dengan tidak ada kompensasi pada tukar menukar harta dengan harta”.

Menurut Sayid Sabiq riba adalah:

الزِّيَادَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ قُلْتُ أَوْ كَثُرَتْ

“Tambahan terhadap modal, sedikit maupun banyak”.

Abdurrahman al-Jaziri berpendapat riba adalah:

زِيَادَةُ أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ الْمُتَجَانِسَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَابَلَ هَذِهِ الزِّيَادَةُ عَوْضٍ

“Penambahan pada salah satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan tanpa ada kompensasi terhadap tambahan tersebut”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa riba merupakan tambahan pembayaran dari modal pokok yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang berakad.⁴⁶

b. Larangan Riba Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah

1) Al-Qur'an

Larangan riba sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat: 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ مِزَاجًا
وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Ali-Imran: 130).⁴⁷

⁴⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 140-141.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang hambanya untuk memakan riba yang berlipat ganda hanya dengan menanggukuhkan pembayaran modal, sehingga modal menjadi berlipat, seperti yang biasa dilakukan pada zaman jahiliyah. Kini, Islam melarang berbuat demikian, karena hal itu merupakan cara keras dan pemerasan terhadap orang yang sedang membutuhkan pertolongan.⁴⁸

Imam Ibnu Jabir mengatakan “Janganlah kalian memakan riba berlipat ganda dalam Islam, sesudah Allah memberikan petunjuk kepada kalian, seperti yang biasa kalian lakukan pada zaman Jahiliyah. Dalam masa Jahiliyah, seseorang melakukan riba berlipat ganda ini dengan cara memberikan utang kepada orang lain dengan masa pembayaran yang disebutkan waktunya. Bila waktu pembayaran telah tiba, yang berpiutang meminta kepada yang berutang, dan biasanya yang berutang akan mengatakan, “Tanggukuhkanlah pembayaran uangmu, nanti akan aku tambah lagi”, keduanya menyetujui hal itu. Itulah yang dinamakan riba berlipat ganda. Kemudian, Allah SWT mencegah mereka melakukannya dalam agama Islam.”⁴⁹

Dalam ayat lain Allah SWT menjelaskan tentang keharaman riba, yaitu dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat: 161, yang berbunyi:

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 66.

⁴⁸ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 108.

⁴⁹ *Ibid.*

وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوْا وَقَدْ هُمُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَطِيلِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (Q.S. An-Nisa: 161).⁵⁰

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberi isyarat akan keharaman riba melalui kecaman terhadap praktik riba di kalangan masyarakat Yahudi. Dalam ayat ini riba digambarkan sebagai suatu pekerjaan yang zalim dan batil. Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukannya. Pada ayat ini Allah lebih tegas lagi terhadap riba melalui riwayat orang yahudi.⁵¹

2) As-Sunnah

Larangan riba juga telah di jelaskan dalam hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan dari jabir.

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ⁵²

“Dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, pemberi (kurirnya) orang yang makan riba, saksinya, dan pencatatnya. (H.R. Ibnu Majah).

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 103.

⁵¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 246.

⁵² Abu Ahmad as Sidokare, *Kutubus Sittah Kitab Shahih Abu Daud*, (Jakarta: Kampung Sunnah, 2009), h. 2279.

Para ulama sepakat bahwa riba itu diharamkan. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah SWT. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba. Allah mengharamkan riba karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik riba tersebut. Larangan dari praktik ini adalah bertujuan menolak kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan manusia.⁵³

c. Jenis-Jenis Riba

Riba dilihat dari asal transaksinya dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu riba yang berasal dari transaksi utang-piutang dan jual beli.

1) Riba dari Utang-piutang

Riba ini terjadi disebabkan adanya transaksi utang-piutang antara dua pihak. Riba yang berasal dari utang-piutang dibagi menjadi dua jenis yaitu riba *qard* dan riba *jahiliyah*.

a) Riba *Qard*

Merupakan tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman

⁵³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 242.

meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak peminjam pada saat peminjam mengembalikan pinjamannya.

Misalnya: Annisa meminjam uang kepada Antony sebesar Rp. 10.000.000,- dalam waktu satu tahun. Dalam perjanjian, Annisa harus mengembalikan sebesar Rp. 11.000.000,- kepada Antony. Uang sebesar 1.000.000,- yaitu selisih antara Rp. 11.000.000,- dan Rp. 10.000.000,- adalah riba.

b) Riba *Jahiliyah*

Riba *jahiliyah* merupakan riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan. Misalnya: Annisa meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Antony dengan jangka waktu satu bulan. Dalam perjanjian disebutkan bila Annisa tidak dapat mengembalikan pinjamannya dalam satu bulan, maka setiap bulan keterlambatan pembayarannya akan dikenakan tambahan 2% dari pokok pinjamannya. Dalam contoh ini, misalnya Annisa melunasi pinjamannya pada bulan kedua, maka Annisa akan membayar sebesar Rp. 10.200.000,- ($102\% \times \text{Rp. } 10.000.000,-$). Kelebihan pembayaran dari pokok pinjamn sebesar Rp. 200.000,- adalah riba.

2) Riba dari Transaksi Jual Beli

Riba juga bisa disebabkan dari transaksi pertukaran barang atau jual beli. Riba yang berasal dari transaksi jual beli dibagi menjadi dua jenis yaitu riba *fadl* dan *nasiah*.

a) *Riba Fadhl*

Adalah tambahan yang diberikan atas pertukaran barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Barang yang menjadi objek pertukaran adalah termasuk dalam jenis barang ribawi.⁵⁴ Misalnya: Pertukaran antara gandum 100 kg ditukar dengan gandum 105 kg merupakan praktik riba.

b) *Riba Nasiah*

Merupakan pertukaran antara jenis barang ribawi yang satu dan yang lainnya. Pihak satu akan mendapatkan barang yang jumlahnya lebih besar disebabkan adanya perbedaan waktu dalam penyerahan barang tersebut. Penerima barang akan mengembalikan dengan kualitas yang lebih tinggi karena penerima barang akan mengembalikan barang tersebut dalam waktu yang akan datang.⁵⁵ Misalnya: Pada 01 Agustus 2009, Annisa meminjam beras kepada Antony 100 kg. Pada 01 Agustus 2010, Annisa akan mengembalikan beras ini sebanyak 110 kg. Perbedaan waktu ini yang membuat pihak penerima barang harus mengembalikan dengan jumlah yang lebih tinggi. Hal ini tergolong transaksi riba yang larang.

Pelarangan riba *nasiah* mempunyai pengertian bahwa penetapan keuntungan positif atas uang yang harus dikembalikan dari suatu pinjaman sebagai imbalan karena menanti, pada

⁵⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2011), h. 11-15.

⁵⁵ *Ibid.*

dasarnya tidak diizinkan oleh syariah. Tidak ada perbedaan apakah uang itu dalam prosentase yang pasti dari uang pokok atau tidak, atau suatu jumlah yang harus dibayar dimuka atau dikemudian hari, atau diberikan dalam bentuk hadiah atau jasa yang diterima sebagai syarat peminjaman.⁵⁶

d. Sebab-sebab haramnya riba

Adapun sebab-sebab diharamkannya riba diantaranya sebagai berikut:

- 1) Karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkannya.
- 2) Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbalannya, seperti seseorang menukarkan uang kertas Rp. 10.000.00 dengan uang recehan senilai Rp. 9.950.00 maka uang senilai Rp. 50,00 adalah riba.
- 3) Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara'. Jika riba sudah mendarah daging pada seseorang, orang tersebut lebih suka beternak uang karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan lebih besar daripada dagang dan dikerjakan tidak dengan susah payah.
- 4) Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang-piutang sehingga riba lebih memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.⁵⁷

⁵⁶Syafi'I Antonio, et.al, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2006), h. 31.

⁵⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 58-61.

e. Dampak Negatif Riba

Adapun dampak negatif dari praktik riba dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat adalah:

- 1) Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terhadap si miskin.⁵⁸
- 2) Menyebabkan kebangkrutan usaha yang pada gilirannya menyebabkan keretakan rumah tangga jika peminjam tidak mampu mengembalikan pinjamannya.
- 3) Riba akan menimbulkan kemalasan berusaha karena pemilik modal menggantungkan pendapatan dari hasil bunga uang yang dipinjamkan.
- 4) Memutuskan hubungan silaturahmi antara sesama manusia.
- 5) Menyebabkan hati orang yang terlibat riba menjadi guncang, perasaannya tumpul dan fikirannya kusut.⁵⁹

f. Hukum memberikan Kelebihan Dalam Membayar Utang

- 1) Kelebihan yang diperjanjikan

Utang seharusnya dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan yang diterima dari orang yang memberikan utang tanpa tambahan, namun apabila terdapat penambahan pembayaran yang dilakukan atas kemauan orang yang berutang secara ikhlas sebagai tanda terimakasih atas bantuan pemberian utang dan bukan didasari atas perjanjian

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, h. 241.

sebelumnya, maka kelebihan tersebut *halal* bagi pihak yang memeberikan utang, dan merupakan kebaikan bagi orang yang berutang.⁶⁰

2) Kelebihan yang Diperjanjikan

Tambahan yang dikehendak oleh pemberi utang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal itu tidak boleh, tidak halal orang yang memberi utang untuk mengambil tambahan itu. Misalnya orang yang memberi utang berkata kepada yang berutang, “Saya memberi utang engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian.” Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk *riba*.

Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

عَنْ فَضَّلَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَا حِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ مِنْ وَحْوِهِ الرِّبَا. (رواه البيهقي)⁶¹

Artinya: “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam *riba*”.

g. Perkara-perkara yang tidak boleh Terjadi Pelebihan dan Penundaan Padanya

Para ulama’ telah sepakat bahwa salah satu dari pelebihan atau penundaan tidak boleh terjadi pada salah satu jenis barang yang telah

⁶⁰H. Ahmad Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung 2015), h. 165.

⁶¹ Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra juz 2 Hadis ke-11252* (Majelis Dairah al-Maarif al-Nizhamiyah, 1344), h. 72.

dinyatakan dalam hadits Ubbadah bin Shamit, kecuali apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra.

Hadits Ubbadah berbunyi:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ،
وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بَعَيْنٍ فَمَنْ
زَادَ أَوْ زَادَ فَقَدْ أَرَى

Saya mendengar Rasulullah SAW, menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali sama banyaknya dan dilakukan dengan tunai. Maka barang siapa menambah atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah melakukan riba.

h. Perkara-perkara yang Dibolehkan Pelembihan dan Dilarang Penundaan Padanya

Imam Maliki dan Syafi'I berpendapat, bahwa alasan dilarangnya penundaan pada perkara-perkara riba itu harus berupa makanan. Akan halnya perkara-perkara yang bukan ribawi dan tidak berupa makanan, maka alasan dilarangnya pelambatan bagi Imam Maliki adalah karena satu jenis dan sama manfaatnya, disamping pelembihan. Sedang bagi Imam Syafi'I, tidak ada penundaan pada perkara-perkara selain riba. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa alasan dilarangnya penundaan pada perkara-perkara ribawi adalah takaran. Sedangkan perkara-perkara yang bukan riba, maka alasan dilarangnya penundaan ialah satu jenis, baik dengan pelembihan atau tidak. Dari Riwayat Ibnu'I-Qasim dari Imam Malik, terkesan bahwa ia melarang penundaan pada perkara-perkara

yang bukan ribawi ini, lantaran hal ini menurut pendapatnya termasuk dalam bab hutang yang mendatangkan manfaat.⁶²

4. BUNGA

a. Pengertian Bunga

Menurut Islam bunga adalah riba yang haram (terlarang) hukumnya. Artinya, bisnis dalam Islam yang didasarkan pada Prinsip Syariah tidak mengenal pembebanan bunga oleh pemilik modal atau investor atau kreditur atas penggunaan yang dipinjamkan oleh kreditur (pemilik modal atau investor) kepada debitur (peminjam uang).⁶³

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).⁶⁴

Konsep bunga adalah konsep yang dipraktikkan dalam bisnis berdasarkan kapitalisme. Konsep bunga yang diterapkan oleh kapitalisme tersebut tidak memedulikan atau mempertimbangkan apakah bisnis debitur mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian.⁶⁵

⁶² Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul'l Mujtahid*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990), h. 10, 17.

⁶³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 157.

⁶⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 131.

⁶⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 157.

Keuntungan pada bunga diantaranya sebagai berikut:

- 1) Besarnya bunga ditetapkan pada saat perjanjian dan mengikat kedua pihak yang melaksanakan perjanjian dengan asumsi bahwa pihak penerima pinjaman akan selalu mendapatkan keuntungan.
- 2) Besarnya bunga yang diterima berdasarkan perhitungan presentase bunga dikalikan dengan jumlah dana yang dipinjamkan.
- 3) Jumlah bunga yang diterima tetap, meskipun usaha peminjam meningkat atau menurun.
4. Sistem bunga tidak adil, karena tidak terkait dengan hasil usaha peminjam.
- 5) Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama.

b. Macam-macam bunga

Dalam kegiatan perbankan ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya diantaranya sebagai berikut.⁶⁶

1) Bunga Pinjaman

Adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. sebagai contoh bunga kredit.

2) Bunga Simpanan

Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan

⁶⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 131.

harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. sebagai contoh jasa giro, bunga deposito, dan bunga tabungan.

5. PERJANJIAN DALAM HUKUM POSITIF

a. Pengertian Perjanjian

Menurut Prof. Subekti, S.H., perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁶⁷

Suatu perjanjian adalah hubungan timbal balik atau bilateral antar para pihak yang mengikatkan diri didalamnya, disamping memperoleh hak-hak dari perjanjian tersebut juga menerima kewajiban-kewajiban sebagai bentuk konsekuensi atas hak-hak yang diperoleh.⁶⁸

b. Syarat Sah Perjanjian

Menurut pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (pasal 1321 KUH Perdata).

⁶⁷ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 285.

⁶⁸ Ratna Artha Windasari, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 2.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap (Pasal 1329 KUH Perdata). Menurut pasal 1330 KUH Per, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

- a) Orang yang belum dewasa
- b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dimintakan pembatalannya kepada hakim.⁶⁹

3) Adanya objek atau suatu hal tertentu

Dalam suatu perjanjian, objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak. Objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga tidak berbuat sesuatu. Yang dapat menjadi objek perjanjian menurut pasal 1332 dan 1334 KUH Perdata antara lain:

- a) Dapat diperdagangkan
- b) Objeknya jelas (ditentukan jenisnya)
- c) Jumlah dapat ditentukan/dihitung
- d) Bisa barang yang akan ada di kemudian hari
- e) Bukan warisan yang belum terbuka

⁶⁹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 285.

4) Adanya kausa yang halal

Sah atau tidaknya kausa dari suatu perjanjian ditentukan saat perjanjian itu dibuat. Suatu sebab dikatakan halal sebagaimana diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata yakni perjanjian tersebut:

- a) Tidak bertentangan dengan Undang-Undang
- b) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum
- c) Tidak bertentangan dengan kesusilaan.⁷⁰

c. Jenis-Jenis Perjanjian

Jenis-jenis perjanjian ini dapat dibedakan dalam beberapa hal, yaitu:

- 1) Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Contoh perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, dan sebagainya.
- 2) Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak dan pihak lain menerima haknya.
- 3) Perjanjian Cuma-Cuma yaitu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya.
- 4) Perjanjian atas beban adalah perjanjian dengan mana terhadap prestasi pihak yang lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungan hukum.
- 5) Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

⁷⁰ Ratna Artha Windasari, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 2.

- 6) Perjanjian riil adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak disertai dengan penyerahan nyata atas barangnya.
- 7) Perjanjian bernama (perjanjian *nominaat*) adalah perjanjian yang mempunyai nama tertentu dan diatur secara khusus oleh undang-undang.
- 8) Perjanjian tidak bernama (perjanjian *innominaat*) adalah perjanjian tidak mempunyai nama tertentu dan tidak diatur dalam undang-undang.
- 9) Perjanjian liberatoir adalah perjanjian yang membebaskan orang dari keterkaitannya dari suatu kewajiban hukum tertentu.
- 10) Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk menyerahkan atau mengalihkan atau menimbulkan atau mengubah menghapuskan hak-hak kebendaan.
- 11) Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan antara kedua belah pihak.
- 12) Perjanjian accesoir adalah perjanjian yang membuntuti perjanjian pokok.⁷¹

d. Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak agar tercapai apa yang menjadi tujuan bersama. Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah diperjanjikan atau apa yang telah menjadi kewajiban dalam perjanjian tersebut. Kewajiban inilah yang disebut

⁷¹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 289-290.

prestasi, sedangkan jika salah satu pihak atau bahkan kedua pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya maka hal itu disebut sebagai wanprestasi.

Pihak yang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan, namun pihak yang diduga melakukan wanprestasi masih dapat melakukan pembelaan-pembelaan agar dia terbebas dari pembayaran ganti rugi.⁷²

B. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktik Utang-piutang Gabah pada Lumbung Padi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah belum ditemukan, adapun beberapa penelitian yang hampir sama dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, diantaranya:

1. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang-Piutang Gabah Dengan Tambahan Sedekah (Studi di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)”, di dalamnya membahas tentang analisis hukum Islam terhadap praktik utang-piutang gabah dengan tambahan sedekah. Skripsi ini memberikan kesimpulan bahwa praktik utang-piutang gabah dengan tambahan sedekah di Masjid Bitus Syarfan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena walaupun praktik

⁷² Ratna Artha Windasari, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 33.

tersebut dilakukan kedua pihak dengan dasar suka sama suka namun di dalamnya terdapat unsur riba nasi'ah yang diharamkan Islam.⁷³

2. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Uang Dibayar Gabah Studi di Desa Plosojen Kecamatan Kauman Ponorogo), di dalamnya membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang uang dibayar gabah. Skripsi ini memberikan kesimpulan bahwa praktik utang uang dibayar gabah di Desa Plosojen Kecamatan Kauman Ponorogo pada dasarnya boleh dilakukan atau sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat *qardh*. Namun dengan adanya syarat dalam akad yang dirasa kurang sesuai dengan syariat Islam maka hukumnya menjadi tidak sah atau tidak boleh. Dalam ketentuan pengambilan utang, nilai barang dipotong berdasarkan tempo utang ini dilarang dalam hukum Islam karena terdapat unsur memberikan dua atau lebih harga dalam satu akad. Serta adanya tambahan terhadap pengembalian utang, apabila tambahan dibebankan atas utang konsumtif itu tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena tambahan tersebut termasuk riba *nasi'ah*.⁷⁴

3. “Analisis Hukum Islam Tentang Utang-piutang Padi Basah Dengan Padi Kering Studi di Desa Tulungagung, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu), di dalamnya membahas tentang analisis hukum Islam tentang utang-piutang padi basah dengan padi kering. Skripsi ini memberikan

⁷³ Yunita Astuti, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang-Piutang Gabah Dengan Tambahan Sedekah (Studi di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)” (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

⁷⁴ Ariska Dewi Nofitasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah Studi di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo”, (Skripsi uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).

kesimpulan bahwa praktik utang-piutang padi basah dengan padi kering adalah praktik utang-piutang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi utang dan penerima utang, terdapat persetujuan antara pihak-pihak itu, objek berupa benda, tujuan bersifat kebendaan, dan ada bentuk tertentu yaitu lisan yang semua itu merupakan nunsur-unsur perjanjian dalam hukum positif. Praktik utang-piutang tersebut juga telah memenuhi rukun dan syarat utang-piutang. Kelebihan dalam pembayaran utang-piutang dalam skripsi ini tidak diperjanjikan diawal transaksi sehingga tidak termasuk riba.⁷⁵

Jika dilihat dari uraian beberapa judul skripsi di atas maka terdapat persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang praktik utang-piutang dengan tambahan. Sedangkan yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis angkat yaitu “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktik Utang-piutang Gabah pada Lumbung Padi di Desa Sumber Rejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Pringsewu”, penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana praktik serta hukum penerapan tambahan yang diberlakukan pada akad tersebut, dan apakah akad yang diterapkan pada lumbung padi telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau tidak.

Lutfi Hidayati, “Analisis Hukum Islam Tentang Utang-piutang Padi Basah Dengan Padi Kering Studi di Desa Tulungagung, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu”, (skripsi UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010.

Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: Toha Putra, 1993.

Ar-Rifa'I, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

B. Hadits

Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra juz 2 Hadis ke-11252* (Majelis Dairah al-Maarif al-Nizhamiyah, 1344.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, No. 2421, terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Abd Al-Adzim Al-Mundziri, Al-Hafizh Zaki Al-Din, *Ringkasan Shahih Muslim*, terjemahan Syindqithy Djamaluddin, Mochtar Zoerni, Bandung: Mizan, 2002.

Sidokare, Abu Ahmad as, *Kutubus Sittah Kitab Shahih Abu Daud*, Jakarta: Kampung Sunnah, 2009.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Antonio, Syafi'I, et.al, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia, 2006.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Darsono, et. al, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia, 2011.

Janwari, Yadi, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

-----, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Mustofa, Imam, *Fiqh Mualamah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Suhaili, Abdullah, *Riba*, Jakarta: Hudaya, 1970.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Cet.Ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

D. Hukum Dan Perundang-Undangan

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Simanjuntak, P.N.H., *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.

Windasari, Ratna Artha, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014

.

E. Sumber Penunjang

1) Jurnal

Mahmudah, Siti, Reformasi Syariat Islam: Kritik Pemikiran Khalil Abdul Karim, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 13 No.1, Juli 2016.

2) Buku Panduan

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research Jilid 2*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Kalean, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Narbuko, Cholid, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Cet.Ke-14, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Suprayogi, Imam, dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.

3) Wawancara

Suyono, wawancara dengan penulis, Di rumah bapak Suyono, Bangunrejo, 21 Desember 2019.

Kasno, wawancara dengan penulis, Di rumah bapak Kasno, Bangunrejo, 21 Desember 2019.

Sunarso, wawancara dengan penulis, Di rumah bapak Sunarso, Bangunrejo, 21 Desember 2019.

Slamet, wawancara dengan penulis, Di rumah bapak Slamet, Bangunrejo, 21 Desember 2019.

Tukijan, wawancara dengan penulis, Di rumah bapak Tukijan, Bangunrejo, 21 Desember 2019.